

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

- Tahun Sidang : 2015-2016
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- : 17
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Rabu, 15 Juni 2016
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
- Acara : Membahas APBN-P Tahun 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah pada RAPBN Tahun 2017
- Ketua Rapat : Edhy Prabowo, MM., MBA.
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
- Hadir : A. 42 Anggota dari 51 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr.Ir. Siti Nurbaya, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
 2. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal);
 3. Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo. M.A. (Inspektorat Jenderal);
 4. Dr.Ir. Tachir Fathoni, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem);
 5. Dr.Ir. Hilman Nugroho, M.P. (Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung);
 6. Dr.Ir. Ida Bagus Putera Parthama, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari);
 7. Drs. M.R. Karliansyah, M.S. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan);
 8. DR.Ing.Ir. Hadi Daryanto, D.E.A. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan);
 9. Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
 10. Dr.Ir. Bambang Soepijanto, M.M. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia); dan
 11. Dr. Henry Bastaman, MES. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi)
- beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membahas APBN-P Tahun 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah pada RAPBN Tahun 2017, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 dibuka pukul 11.00 WIB oleh Ketua Rapat Edhy Prabowo, MM., MBA dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menyetujui RAPBN-P Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 sebesar Rp5.845.653.126.000,-. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti hasil rapat kerja ini kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bagian dalam pembahasan RUU tentang Perubahan APBN TA 2016.
2. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan realokasi antar program pada APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 sebesar Rp650.000.000.000,- yang semula dialokasikan untuk pengadaan helikopter dialihkan untuk kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, serta pemulihan areal bekas kebakaran hutan dan lahan.
3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas usulan Pagu Indikatif APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 sebesar Rp7.528.187.986.000,- yang bersumber dari:
 - a. Rupiah Murni sebesar Rp4.976.671.096.000,-;
 - b. PNPB sebesar Rp1.173.089.717.000,-;
 - c. BLU sebesar Rp38.295.000.000,-; dan
 - d. HLN sebesar Rp140.132.173.000,-.dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp534.751.856.000,-;
 - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp48.168.131.000,-;
 - c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebesar Rp604.980.421.000,-;
 - d. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sebesar Rp1.167.653.760.000,-;
 - e. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar Rp1.980.940.834.000,-;
 - f. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebesar Rp328.222.417.000,-;
 - g. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi sebesar Rp287.553.866.000,-;
 - h. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp309.901.486.000,-;
 - i. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebesar Rp159.972.263.000,-;
 - j. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp241.840.990.000,-;
 - k. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebesar Rp424.590.470.000,-;
 - l. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya sebesar Rp129.509.981.000,-;
 - m. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebesar Rp110.101.511.000,-; dan
 - n. Badan Restorasi Gambut (BRG) sebesar Rp1.200.000.000.000,-.Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan membahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar postur anggaran memperhatikan skala prioritas program, diantaranya program pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung.
5. Komisi IV DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sepakat untuk mendorong penambahan anggaran sebesar Rp5.000.000.000.000,- untuk program dan kegiatan prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada RAPBN Tahun 2017.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.00 WIB.

MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

Ttd.

DR. IR. SITI NURBAYA, M.SC.

KOMISI IV DPR RI
KETUA RAPAT,

Ttd.

EDHY PRABOWO, MM., MBA.

Rp6.328.187.986.000,-

